PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK
DAN KEPATUHAN MATERIAL WAJIB PAJAK
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Survei Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)

THE EFFECT OF TAX POLICY APLICATION
AND TAXPAYERS MATERIAL COMPLIANCE
ON ECONOMIC GROWTH
(Survey On 5 Tax Office At Regional Office Of The Directorate General Of Taxation West Java I)

Disusun Oleh:
Panca Hariman 2.11.10.196
(email : pancabarca@gmail.com)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This study was conducted to determine how much influence of the tax policy implementation and taxpayer material compliance on economic growth in five Tax Office in the Regional Office of the Directorate General Of Taxation West Java I at Bandung.

The research use descriptive and verificative analysis methods. Method of Multiple Linear Regression Analysis with using program SPSS 17.0 is used in hypothesis testing. The data used in this study are primary and secondary data.

The results showed that the application of tax policy had positive effect on economic growth. So with the taxpayer material compliance had positive effect on economic growth. This means that if tax policy been better and taxpayer material compliance increases, it will be followed by an increase of economic growth rate.

The results of hypothesis testing showed that together, tax policy and taxpayer material compliance give 64,3% effect to the economic growth in five Tax Office's working area in Regional Office Of The Directorate General Of Taxation West Java I at Bandung. While remaining 35,7% is influenced by other factors such as government spending, tax revenue, and tax ratio. This result shows that all the hypotheses in this study are received.

Keywords : Tax Policy, Taxpayer Compliance, Taxpayer Material Compliance, Economic Growth, Tax

---

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Gunadi, 2009). Pajak mempunyai dua fungsi yaitu, Fungsi penerimaan (*budgetair*) dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2009). Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak, maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara (Rahayu, 2007).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat (Boediono, 1999). Mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Boediono, 1999). Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Jhingan, 2000). Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya (Jhingan, 2000). Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat Produk Domestik Bruto (Imamul Arifin, 2009). Produk domestik bruto /

GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (McEachern dalam Imamul Arifin, 2009). GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat (McEachern dalam Imamul Arifin, 2009). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik (Imamul Arifin, 2009).

Salah satu kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah berupa kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan (*Tax policy*) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik dan sosial pemerintah (Prakosa, 2003). Dengan adanya kebijakan perpajakan ini pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dalam rangka untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan (Prakosa, 2003).

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak merupakan salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan maju (Fuad Rahmany, 2013). Hal ini karena kontribusi dari sektor perpajakan akan membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Fuad Rahmany, 2013).

Sudah saatnya bagi pemerintah untuk menerbitkan kebijakan terobosan yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional serta bisa menambah pendapatan negara (Aviliani, 2012). Akan tetapi strategi insentif pajak yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk menarik minat investor justru dikritik. Pemerintah Indonesia mestinya tidak gampang mengeluarkan kebijakan fiskal berupa insentif karena akan menggerus potensi penerimaan pajak (Angela Gurria, 2012). Hal tersebut dapat menciptakan distorsi, dimana saat ini Indonesia justru sangat butuh pemasukan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan fasilitas sektor pendidikan, serta investasi dalam mendorong inovasi serta produktifitas usaha kecil menengah (UKM) (Angela Gurria, 2012). Pemerintah harusnya memberlakukan pajak yang lebih tinggi untuk sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya alam seperti pertambangan (Angela Gurria, 2012). Selain itu, perluasan basis pajak serta pembenahan administrasi perpajakan juga harus menjadi prioritas, termasuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang kaya. (Angela Gurria, 2012). Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong pertumbuhan investasi dan produksi sektor riil, untuk meningkatkan perekonomian dan kemampuan wajib pajak dalam meningkatkan pembayaran pajaknya (Rizal Djalil, 2014).

Maksud penulis melakukan penelitian ini semata-mata adalah untuk maksud penyususnan skripsi. Adapun pengumpulan data dan informasi yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pajak, Kepatuhan Material Wajib Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh dari penerapan kebijakan pajak dan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Kota Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Kebijakan perpajakan (*Tax policy*) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik dan sosial pemerintah. Dengan adanya kebijakan perpajakan ini pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak, dalam rangka untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan (Prakosa, 2003).

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dalam Wahyu Santoso, 2008).

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Joko Untoro, 2010).

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dengan adanya fungsi mengatur yang melekat pada pajak, pajak dapat digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan yang salah satunya adalah tujuan ekonomi.

Hipotesis :

H_1 : Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H_2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H_3 : Kebijakan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian, karena objek penelitian merupakan inti dari permasalahan yang akan dijadikan sebagai penelitian. Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu (Husein Umar dalam Umi Narimawati, 2010).

Objek dalam Penelitian ini adalah Kebijakan Pajak, Kepatuhan Material Wajib Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1. Mengacu pada tujuan, penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan kebijakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2011). Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui seberapa besar hubungan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono 2011). Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing masing variable penelitian. Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan (Mashuri, 2008).

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis (UmiNarimawati dkk, 2010). Adapun desain dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 pada lampiran.

Dalam melakukan penelitian terlebih dahulu harus menentukan oeperasionalisasi variabel agar mempermudah dalam melaksanakan penelitian.Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan kebijakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi maka diperlukan operasionalisasi variabel untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 pada lampiran.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan Studi Kepustakaan (Library Reseach). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. Dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Sampel dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi atau dengan kata lain disebut dengan sampling jenuh.

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh penerapan kebijakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi linier berganda. Metode Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variable atau lebih, dengan maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat memperkirakan (memprediksi) besarnya dampak kuantitatif yang terjadi dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya (Andi Supangat, 2007). Adapun model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 pada lampiran.

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu Kebijakan Pajak (X_1) dan Kepatuhan Material Wajib Pajak (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen (Y).

Menetapkan Hipotesis :

a. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, dalam penellitian ini hipotesis yang digunakan adalah Hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternative (H_a). Kedua hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis parsial antara variabel bebas kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.
   - Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.
   - Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Hipotesis parsial antara variabel bebas kepatuhan material wajib pajak terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi.
   - Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan material wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.
   - Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan material wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas kebijakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.
   - H_0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.
   - H_a: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka (kuantitatif). Kedua hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t).
  Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu Hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan Hipotesis alternative (H_a) : $\beta \neq 0$.
  - $H_0 : \beta = 0$: Kebijakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
  - $H_a : \beta \neq 0$: Kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
  - $H_0 : \beta = 0$: Kepatuhan material wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
  - $H_a : \beta \neq 0$: Kepatuhan material wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F).
  - $H_0 : \beta = 0$: Kebijakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
  - $H_a : \beta \neq 0$: Kebijakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

- Hasil t_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan kriteria :
  a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
  b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
  c) t_{hitung}; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
  d) t_{tabel}; dicari di dalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut, $\alpha = 0,05$ dan dk = (n-k-1) atau 24-2-1=21
- Hasil F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan kriteria :
  a) Tolak Ho jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien positif.
  b) Tolak Ho jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien negatif.
  c) Tolak Ho jika nilai F-sign <α),05.

Adapun kurva daerah penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat pada Gambar 3.1 pada lampiran.

Penarikan Kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya.Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, kebijakan perpajakan dan kepatuhan material wajib pajak berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya (tidak adanya pengaruh yang meyakinkan atau signifikan antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara penerapan kebijakan pajak dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,726. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,726 termasuk ke dalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam rentang interval 0,600 dampai dengan 0,799. Hasil dari koefisien determinasi penerapan kebijakan pajak memberikan pengaruh sebesar 41,59%. Ini berarti bahwa penerapan kebijakan pajak berpengaruh signifikan sebesar 41,59 % terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jabar I di Kota Bandung. Sisanya sebesar 58,41% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti BI Rate, Belanja Pemerintah, dan lain-lain. Hasil dari pengujian nilai t_{hitung} untuk penerapan kebijakan pajak sebesar 8,633 berada di daerah penolakan H_0 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Karena nilai T_{hitung} (8,633) lebih besar dari T_{tabel} (1,98) maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah kerja KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I di Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis verifikatif dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan teori Daniel J. Mitchell (2003).

Hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara Kepatuhan Material Wajib Pajak dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,608. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,608 termasuk ke dalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam rentang interval 0,600 dampai dengan 0,799. Hasil dari koefisien determinasi Kepatuhan Material Wajib Pajak memberikan pengaruh sebesar 22,74 %. Ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan sebesar 22,74 % terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah kerja KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I di Kota Bandung. Sisanya sebesar 77,26 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti penerimaan pajak dan rasio pajak. Hasil dari pengujian nilai t_{hitung} untuk Kepatuhan Material Wajib Pajak 5,624 berada di daerah penolakan H_0 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Karena nilai T_{hitung} (5,624) lebih besar dari T_{tabel} (1,98) maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Material Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah kerja KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I di Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis verifikatif dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Material Wajib Pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan teori Bernard P. Herber dalam Nurmantu (2003), juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita Rosdiana (2013).

Penerapan kebijakan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 64,3% terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPP di Kanwil DJP Jabar I di Kota Bandung. Sisanya sebesar 35,7% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti seperti BI Rate, belanja pemerintah, penerimaan pajak, dan rasio pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
   1) Penerapan kebijakan pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti belanja pemerintah. Terdapat hubungan cukup kuat antara kebijakan pajak dengan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti apabila kebijakan perpajakan berjalan baik maka laju pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat.
   2) Kepatuhan material wajib pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti *tax ratio,* penerimaan pajak, dan lain-lain. Terdapat hubungan cukup kuat antara kepatuhan wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat.

3) Kebijakan pajak dan Kepatuhan Material Wajib Pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dimana terdapat hubungan yang cukup kuat, namun hubungan antara Kebijakan pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi lebih dominan dibandingkan kepatuhan wajib pajak terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

2. Saran

1) Saran Praktis/Operasional

Bagi Instansi/Lembaga Pemerintah

Melihat masih besarnya potensi pemungutan pajak saat ini, ada baiknya dalam mencapai tujuan ekonomi perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan disesuaikan lebih pada keadaan perekonomian masyarakat. Dalam upaya menggali potensi penerimaan pajak, bila memungkinkan sebuah kebijakan (yang dalam penelitian ini kebijakan perpajakan) dibuat agar dirasa tidak memberatkan wajib pajak, tetapi juga tidak menurunkan tingkat penerimaan pajak itu sendiri. Kinerja yang baik dari para pelaksana kebijakan perlu terus diperbaiki (penulis tidak beranggapan bahwa kinerja instansi terutama DJP beserta staff dan pegawai tidak baik). Hal seperti demikian rasanya perlu demi meningkatkan kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap instansi, yang bilamana mereka semakin percaya tidak menutup kemungkinan bahwa kepatuhan masyarakat membayar pajak akan muncul dengan sendirinya tanpa paksaan lagi. Hal seperti sosialisasi perpajakan dan sensus pajak ada baiknya lebih sering dilakukan, serta kualitas pelayanan intansi terhadap wajib pajak terus ditingkatkan.

2) Saran Akademis

Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar para peneliti berikutnya dapat lebih melengkapi dan mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak diteliti seperti BI Rate, Belanja Pemerintah, Penerimaan Pajak, dan Rasio Pajak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

_____, 2013. *Produk Domestik Regional Bruto: PDRB Menurut Kecamatan Di Kota Bandung Tahun 2011-2012*. Katalog BPS : 9205-3273.

Andi Supangat. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik, Edisi Pertama cetakan Ke-3*. Jakarta: Kencana.

Bambang Prakosa. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Pres.

Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Grasindo.

Imamul Arifin.2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: PT.Setia Purna Inves.

Ita Rosdiana. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dan Implikasinya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat I).

Jhingan, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Press.

Joko Untoro. 2010. *Ekonomi.* Jakarta: Kawah Media.

Mardiasmo.2009. *Perpajakan.Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta:Andi Offset.

Mashuri. 2008. *Penelitian Verifikatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.

Mitchell, Daniel J. 2003. *Nine Simple Guidelines for Pro-Growth Tax Policy. Capitalism Magazine*.

Ning Rahayu. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No.1 (Januari).

Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. "*Sistem Perpajakan". Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal, Edisi Pertama.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung.

Umi Narimawati dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah: *Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Genesis. Jakarta.

Wahyu Santoso. 2008. *Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Keuangan Publik. Vol.5 No.1 Hal 85-137.

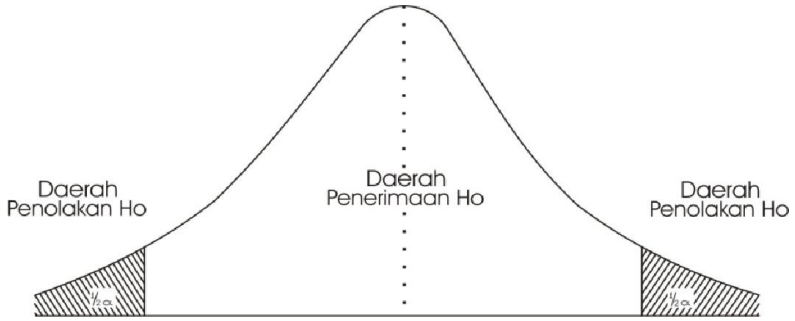
Anep Paoji. 2014. *Kesadaran Wajib Pajak Lapor SPT Masih Minim*. Bisnis-Jabar.com.

Ester Nuky, 2014. *Realisasi Pajak Melonjak 14,7 Persen*. www.investor.co.id.

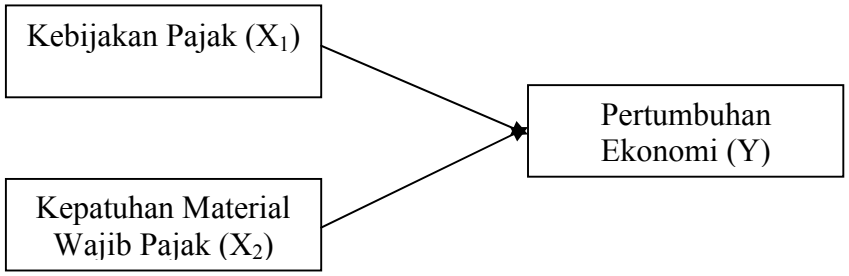
Faisal Maliki Baskoro, 2014. *BPK: Sektor Tambang Masih Tunggak Pajak Rp 628 Miliar*. www.Beritasatu.com.
Razali Ritonga, 2009. *Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi*. www.perpustakaan.bappenas.go.id.
Septian Deny, 2013. *Dirjen Pajak: Pertumbuhan Pajak Melambat Bukan Menurun*. www.bisnis.liputan6.com.
Owi. 2012. *Gaji Rp 24,3 Juta Bebas Pajak*. www.JPNN.com.
Owi, 2012. OECD : *Indonesia Jangan Obral Insentif Pajak*. www.JPNN.com.
Www.Pajak.go.id.

VII. LAMPIRAN

Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



Gambar 4.5
Model Analisis Regresi Berganda

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitan	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode yang Digunakan**	**Unit Analisis**	***Time Horizon***
T-1	Deskriptif & Verifikatif	*Explanatory Survey*	KPP di Kanwil DJP Jabar I	*Cross Sectional*
T-2	Deskriptif & Verifikatif	*Explanatory Survey*	KPP di Kanwil DJP Jabar I	*Time Series*
T-3	Deskriptif & Verifikatif	*Explanatory Survey*	KPP di Kanwil DJP Jabar I	*Time Series*

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Kuesioner	Skala
Kebijakan Pajak (X_1)	Penerapan Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (fiscal policy). Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. (Siti Kurnia Rahayu, 2010)	1. Perluasan dan peningkatan wajib pajak; 2. Perluasan obyek pajak; 3. Penyempurnaan tarif pajak; dan 4. Penyempurnaan administrasi perpajakan.	1,2,3 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13	Ordinal
Kepatuhan Material Wajib Pajak (X_2)	Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. (Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010)	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	--	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. (Imamul Arifin, 2009)	Laju Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	--	Rasio

Tabel 4.15
Kolerasi Kebijakan Pajak (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Control Variables			Kebijakan pajak	Pertumbuhan ekonomi
Kepatuhan wajib pajak	Kebijakan pajak	Correlation	1.000	.726
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	98
	Pertumbuhan ekonomi	Correlation	.726	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	98	0

Tabel 4.16
Kolerasi Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Control Variables			X2	Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan pajak	Kepatuhan wajib pajak	Correlation	1.000	.608
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	98
	Pertumbuhan ekonomi	Correlation	.608	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	98	0

Tabel 4.17
Koefisien Determinansi Simultan
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.802[a]	.643	.636	.700	.643	87.497	2	97	.000	1.751

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi Parsial

Model		Standardized Coefficients	Correlations		
		Beta	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)				
	X1	.573	.726	.659	.523
	X2	.374	.608	.496	.341

Tabel 4.19
Pengujian secara parsial X_1 dan X_2 terhadap Y

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.358	.072		4.965	.000
	X1	.387	.045	.573	8.633	.000
	X2	.400	.071	.374	5.624	.000

Tabel 4.20
Pengujian Secara Simultan Kebijakan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	85.859	2	42.930	87.497	.000[a]
	Residual	47.592	97	.491		
	Total	133.452	99			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y